

BAB IV

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan dari RPJMD. Dengan demikian, RKPD disusun berpedoman pada RPJMD. RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 disusun berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Pelaksanaan RPJMD dalam bentuk RKPD bertujuan agar target-target pembangunan jangka menengah dalam rangka pencapaian visi dan misi dapat tercapai.

Adapun Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, yaitu:

“Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”

Penjelasan beberapa kata kunci dari visi diuraikan sebagai berikut:

- a. **Mandiri:** Inti dari bagian visi Mandiri adalah terjadinya proses pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan Kalimantan Utara sebagai wilayah yang mandiri.

Sebagai provinsi yang dicita-citakan mandiri, diharapkan akan mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.

Kemandirian tidak berarti mengisolasi diri melainkan tetap memahami saling ketergantungan dengan daerah lain dalam hubungan yang saling mengisi dan bersifat proaktif. Beberapa permasalahan penting yang terkait dengan kemandirian ini adalah pemenuhan kebutuhan pangan dan energi serta aspek pembangunan lainnya dengan penekanan pada

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

aspek sumber daya manusia menuju Kalimantan Utara yang adil dan makmur. Keadilan dan kemakmuran diupayakan terjadi pada semua aspek kehidupan. Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara diupayakan memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

- b. **Aman dan Damai:** bagian dari visi ini mengarahkan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah dengan kondisi **perpaduan kemajemukan** masyarakat yang aman dan damai untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara demografis, masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara merupakan perpaduan dari berbagai etnis baik yang merupakan penduduk asli maupun pendatang yang pada saat ini dan masa mendatang harus bahu membahu memajukan daerah untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. Kemajemukan ini haruslah diarahkan untuk menjadi potensi pembangunan yang kondusif dengan menjaga suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat dan keragaman kemampuan. Secara geografis Kalimantan Utara merupakan serambi depan bangsa yang berhadapan dengan negara lain, oleh karena itu suasana aman dan terjaganya keutuhan wilayah NKRI menjadi salah satu yang penting untuk diwujudkan. Pertahanan dan keamanan NKRI merupakan urusan yang secara yuridis formil menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun Provinsi Kalimantan Utara haruslah juga berupaya menciptakan keamanan wilayah sesuai tugas dan kewenangannya karena dampak keamanan wilayah akan langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Demikian pula sebagai daerah yang termasuk berjarak cukup jauh dari pemerintahan pusat, penegakan hukum sesuai ketentuan juga harus diwujudkan untuk mendukung suasana aman dan damai masyarakat Kalimantan Utara.
- c. **Pemerintahan yang bersih dan berwibawa:** bagian dari visi ini mengarahkan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki pemerintahan bersih, transparan dan akuntabel. Sebagai propvinsi yang

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

baru, Kalimantan Utara harus memulai dengan dasar yang baik, oleh karena itu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa menjadi penting untuk diwujudkan. Pemerintahan yang bersih dan kemudian berdampak pada kewibawaan menjadi upaya perwujudan pondasi dibangunnya Provinsi Kalimantan Utara yang maju dan baik di masa depan. Dimensi lain yang harus diwujudkan dalam membuat pemerintahan yang berwibawa adalah dihidirkannya sosok pemerintahan daerah berupa berbagai sarana dan prasarana serta kemudahan untuk melayani masyarakat Kalimantan Utara.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan beserta berbagai butir penjelasannya, maka dirumuskan misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mewujudkan visi **Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa** yang telah ditetapkan, ditetapkan 3 (tiga) misi yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan, yaitu:

- 1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri**
- 2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai**
- 3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa**

Berdasarkan visi, misi, dan isu strategis yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri

Tujuan 1: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran:

1. Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat.
3. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat.
4. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan.
5. Meningkatnya pembangunan desa.

Tujuan 2: Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan.

Sasaran:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (*green economy*).
2. Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah.
3. Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga.
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Misi 2: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai

Tujuan: Mendukung terjaganya kedaulatan negara di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan penegakan hukum khususnya di daerah perbatasan.

Sasaran:

1. Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah.
2. Terwujudnya daerah perbatasan yang tertib dan tenteram.

Misi 3: Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa

Tujuan: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sasaran: Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja untuk setiap misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara disajikan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2.

Tabel 4.1
Tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Indikator Kinerja Tujuan				
			2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri							
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,61	70,02	70,43	70,85	71,27
2	Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,21	6,76	7,37	8,04	8,76
Misi 2: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai							
3	Mendukung terjaganya kedaulatan negara di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan penegakan hukum khususnya di daerah perbatasan	Persentase gangguan keamanan yang ditangani (%)	100	100	100	100	100
Misi 3: Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa							
4	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	C	CC	CC	CC	B

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara

Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa									
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target IK Tujuan (2021)	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Sasaran				
					2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri									
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,27	1. Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,95	6,56	6,19	5,84	5,51
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,02	4,82	4,63	4,44	4,26
			2. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Angka harapan lama sekolah (tahun)	12,69	12,79	12,89	12,99	13,09
				Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,63	8,77	8,91	9,05	9,20
			3. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (tahun)	72,58	72,74	72,89	73,05	73,20
			4. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks pembangunan gender	85,79	85,83	85,87	85,91	85,95
				Indeks pemberdayaan gender	68,31	68,92	69,53	70,15	70,78
			5. Meningkatnya pembangunan desa	Persentase desa memiliki status Mandiri dalam IDM (%)	2	3	4	5	6

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa									
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target IK Tujuan (2021)	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Sasaran				
					2017	2018	2019	2020	2021
2. Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	8,76	6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (<i>green economy</i>)	PDRB ADHK (miliar rupiah)	54.362,17	57.759,13	61.368,36	65.203,12	69.277,50
			7. Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	92,86	93,60	94,26	94,85	95,39
			8. Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat ekonomi (konektivitas) di wilayah provinsi (%)	18,9	23,15	27,34	31,03	34,65
				Persentase kecamatan yang dijangkau <i>Broadband</i> (%)	92,8	96,4	100	100	100
9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,73	71,25	72,14	73	74,19			

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa									
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target IK Tujuan (2021)	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Sasaran				
					2017	2018	2019	2020	2021
Misi 2: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai									
3. Mendukung terjaganya kedaulatan negara di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan penegakan hukum khususnya di daerah perbatasan	Persentase gangguan keamanan yang ditangani (%)	100	10. Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah	Persentase kabupaten/kota yang memiliki tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) diatas 75% (%)	100	100	100	100	100
			11. Terwujudnya daerah perbatasan yang tertib dan tenteram	Persentase pelanggaran di perbatasan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100
Misi 3: Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa									
4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	B	12. Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai LKjIP	CC	B	B	B	BB
				Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Nilai LPPD	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa									
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target IK Tujuan (2021)	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Sasaran				
					2017	2018	2019	2020	2021
			13. Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	C	C	B	B	B

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Penyusunan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2019 disusun dengan mempedomani RPJMN 2015-2019 termasuk agenda pembangunan nasional yang disebut juga dengan Nawa Cita, serta RKP Tahun 2019.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2019 yang ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021.
2. Agenda pembangunan nasional (nawa cita) dan strategi dalam RPJMN 2015-2021.
3. Tema dan Prioritas pembangunan nasional Tahun 2019 dalam Rancangan RKP Tahun 2019.
4. Hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu.
5. Permasalahan Pembangunan dan isu strategis daerah
6. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

4.1.1. Telaahan RPJMN Tahun 2015-2019

Perencanaan pembangunan provinsi Kalimantan Utara tidak lepas dari isu atau kebijakan pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan sinergi antardokumen perencanaan pembangunan. Sebelum menentukan prioritas pembangunan Kalimantan Utara Tahun 2019, maka perlu dilakukan telaahan terhadap RPJMN.

Guna menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan 9 (sembilan) agenda prioritas. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 agenda pembangunan (nawa cita) meliputi:

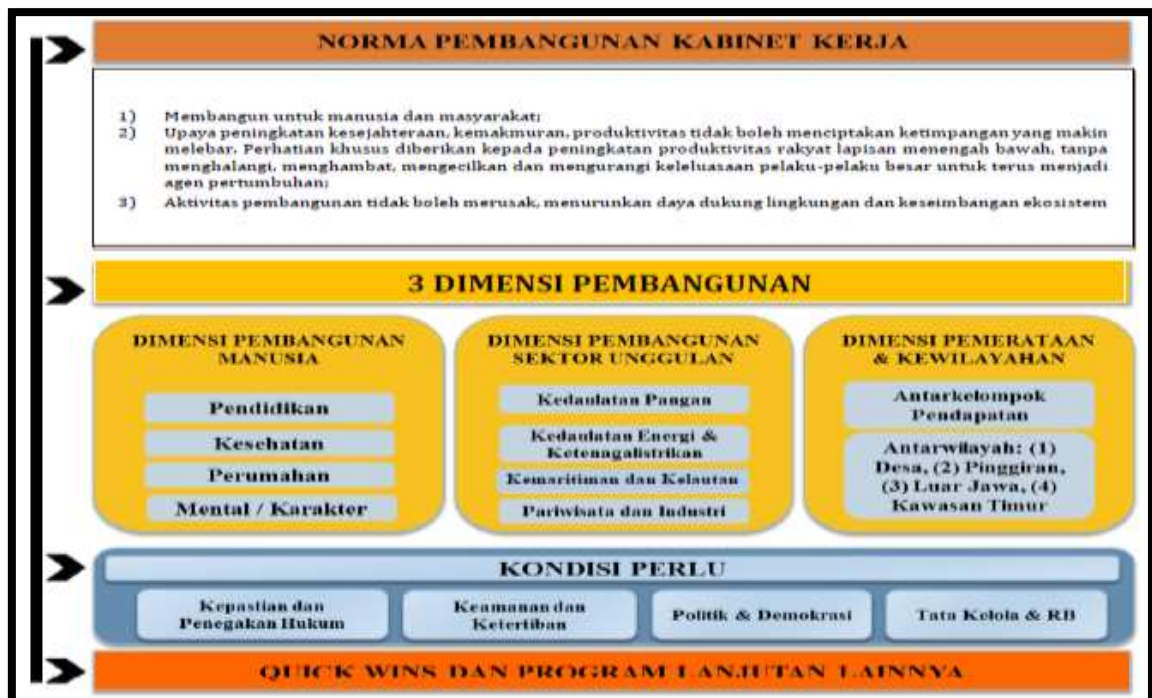
1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Strategi Pembangunan Nasional yang ditempuh untuk mewujudkan nawa cita disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 4.1.
Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019



Sumber: Buku IRPJMN Tahun 2015-2019

4.1.2. Telaahan Rancangan RKP Tahun 2019

Mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2019 dengan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2019. Lebih lanjut, pada Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yaitu penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya.

Rancangan Tema RKP 2019, yaitu:

“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”

Lima Prioritas Nasional (PN) Tahun 2019, yaitu:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.
4. Memantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air.
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Masing-masing prioritas nasional Tahun 2019 memiliki isu strategis, arah kebijakan, program prioritas, dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Uraian masing-masing prioritas nasional disajikan pada tabel di bawah ini.

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.3

Prioritas Nasional Tahun 2019

No	Prioritas Nasional	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
1	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.	1. Percepatan penurunan kemiskinan dan ketimpangan 2. Peningkatan akses pelayanan dasar penduduk	Mempercepat pengurangan kemiskinan	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	1. Penguatan pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran 2. Penguatan sistem jaminan sosial 3. Penguatan literasi untuk kesejahteraan 4. Pelaksanaan reforma agraria 5. Percepatan pemberian akses kelola sumber daya alam kepada masyarakat melalui perhutanan sosial
			Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan 2. Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana 3. Pencegahan dan pengendalian penyakit 4. Percepatan penurunan stunting 5. Penguatan “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
			Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	1. Penyediaan pendidik yang berkualitas dan merata 2. Penyediaan afirmasi pendidikan 3. Penguatan kelembagaan satuan pendidikan 4. Peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik
			Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak	1. Penyediaan akses hunian layak dan terjangkau 2. Penyediaan akses infrastruktur dasar permukiman layak 3. Peningkatan kualitas lingkungan di permukiman
			Meningkatkan tata kelola layanan dasar	Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar	1. Penguatan layanan dan rujukan satu pintu 2. Penguatan integrasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil 3. Percepatan Pencapaian SPM di daerah

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Nasional	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
2	Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.	1. Pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional sektor unggulan	Meningkatkan konektivitas	Peningkatan Konektivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pelabuhan hub dan feeder tol laut 2. Pembangunan transportasi multimoda 3. Pembangunan bandara 4. Pembangunan transportasi perkotaan 5. Keselamatan transportasi
		2. Peningkatan keterpaduan transportasi perkotaan dan keselamatan transportasi	Mengembangkan telekomunikasi dan informatika	Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan infrastruktur telekomunikasi 2. Peningkatan sarana dan prasarana informatika 3. Pengembangan Infrastruktur TIK menuju e-Digital
		3. Peningkatan sarana prasarana komunikasi dan informatika yang berdaya saing	Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pembangunan desa	Pengembangan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pembangunan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pusat kegiatan ekonomi di wilayah Timur 2. Pengembangan Kawasan Perdesaan, termasuk Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan Kawasan Transmigrasi
		4. Optimalisasi pembangunan kota-kota KTI untuk pertumbuhan ekonomi nasional	Melaksanakan pembangunan daerah afirmasi	Pembangunan daerah afirmasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat 2. Pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan 3. Pengembangan wilayah kepulauan 4. Penanganan kawasan rawan bencana
		5. Peningkatan aksesibilitas pusat pertumbuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan di daerah tertinggal dan perbatasan	Melaksanakan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu-hilir perikanan	Pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu-hilir perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan sistem logistik ikan nasional 2. Operasionalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) terpilih 3. Rehabilitasi dan peningkatan layanan pelabuhan perikanan 4. Pengadaan kapal angkut ikan berpendingin dan garam 5. Pembentukan kelembagaan 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penyelesaian rencana zonasi pesisir dan laut
		6. Peningkatan aksesibilitas desa, kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi			
		7. Peningkatan kapasitas SDM di daerah dan desa dalam penyediaan			

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Nasional	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
		sarana prasarana konektivitas 8. Peningkatan sarana dan prasarana sistem logistic perikanan 9. Peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan perikanan			
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.	1. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan 2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri 3. Optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif 4. Peningkatan produktivitas tenaga kerja 5. Optimalisasi pemanfaatan Iptek dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah	Meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	1. Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan Kehutanan dan Jasa Lingkungan 2. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, & Kehutanan 3. Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 4. Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian dan Perikanan
			Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai pasok/nilai, dan pemanfaatan inovasi	Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan	1. Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi 2. Perbaikan Struktur Industri 3. Peningkatan Daya Saing Industri 4. Fasilitasi Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik
		Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui	Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif	1. Percepatan Pengembangan 7 Kawasan Pariwisata, dan 2 KEK Pariwisata 2. Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif	

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Nasional	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
			pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi, dan penguatan kemitraan		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB) 4. Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri 5. Perluasan Akses Keuangan/ Pembiayaan
			Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerja sama dunia usaha dan kewirausahaan	Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha 2. Penguatan Penyelenggaraan Diklat Vokasi 3. Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi 4. Peningkatan Keterampilan Wirausaha
			Mengembangkan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM iptek, pengembangan litbang keilmuan strategis, dan pengembangan teknologi frontier	Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis penunjang produktivitas 2. Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi pengungkit produktivitas 3. Penyiapan SDM Iptek (Peneliti, Perekayasa) 4. Penguatan inovasi dan penguasaan teknologi frontier
4	Memantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kebutuhan Energi. Kebutuhan energi primer akan meningkat dari 1.555 juta BOE di tahun 2015 menjadi 2.086 juta 	Meningkatkan produksi energi primer	Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak dan Gas Bumi 2. Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik 3. Pengembangan EBT 4. Peningkatan Pemanfaatan Batubara dan Gas Bumi Dalam Negeri 5. Peningkatan Efisiensi Energi

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Nasional	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
		Barrel of Oil Equivalent (BOE) di tahun 2019, atau meningkat 7.4% per tahun	Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi		
		2. Pemenuhan Kebutuhan Pangan. Kebutuhan konsumsi pangan masyarakat yang terus meningkat	Meningkatkan aksesibilitas energi		
			Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik		
		3. Pemantapan Ketahanan Sumber Daya Air. Pemenuhan kebutuhan air yang belum terpenuhi untuk rumah tangga, industri dan pertanian. Suplai air menurun.	Mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri	Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	1. Peningkatan Penyediaan Pangan Hasil Pertanian dan Perikanan 2. Peningkatan Sistem Logistik Pertanian dan Perikanan 3. Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat 4. Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian dan Perikanan 5. Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan
		4. Upaya Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Penguatan langkah strategis untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH):	Meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan		
			Memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat		

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Nasional	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
		5. Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon. Penguatan pelaksanaan Perpres No 61/2011 tentang RAN Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi		
			Memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan Sumber Air dan Ekosistemnya 2. Pembangunan Sarana Prasarana Sumber Daya Air 3. Pemulihan dan Pengendalian Air Permukaan dan Air Tanah 4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
			Meningkatkan perlindungan sumber air dan ekosistemnya	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Rehabilitasi dan pemulihan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 4. Penguatan ketahanan terhadap bencana
			Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata		

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Nasional	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
			Mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS	Pemantapan Regulasi dan Penguatan Kelembagaan Energi, Pangan dan SD Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan Regulasi Migas dan Pertambangan 2. Penguatan Pembiayaan Pertanian dan Perikanan 3. Pemanfaatan Inovasi Teknologi dan Penguatan Penyuluhan-pendampingan Pertanian dan Perikanan 4. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Sumber Daya Air 5. Penguatan Kelembagaan di bidang Lingkungan Hidup
			Meningkatkan kesadaran terkait sumber daya air		
5	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat 2. Peningkatan pertahanan berdaya gentar 3. Penguatan kepastian hukum 4. Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5. Pelaksanaan pemilu yang sukses 6. Penegakan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu 	<p>Meningkatkan Kamtibmas dan keamanan siber</p> <p>Menjamin kesuksesan Pemilu</p> <p>Memperkuat pertahanan wilayah nasional</p> <p>Meningkatkan kepastian hukum dan Reformasi Birokrasi</p>	<p>Kamtibmas Dan Keamanan Siber</p> <p>Kesuksesan Pemilu</p> <p>Pertahanan Wilayah Nasional</p> <p>Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap 2. Penanganan Konflik Sosial 3. Penanganan Penyalahgunaan Narkoba 4. Penguatan Kelembagaan Siber serta Identifikasi, Deteksi, Proteksi Penanggulangan, dan Pemulihan Dampak Kejahatan Siber 5. Penanggulangan Terorisme 1. Penguatan Lembaga Demokrasi 2. Peningkatan Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik 3. Netralitas Birokrasi dalam Pemilu 2019 4. Pengamanan Pemilu 1. Pengamanan Wilayah Laut 2. Pengamanan Kawasan Perbatasan dan Kedaulatan Negara 3. Penguatan Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi 1. Penegakan Hukum 2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 3. Pelaksanaan e-Government yang Terintegrasi

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Nasional	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
		7. Pelaksanaan efektivitas diplomasi			4. Talent Management Nasional 5. Pengawasan Program Prioritas Nasional 2019
			Memperkuat efektivitas diplomasi	Efektivitas Diplomasi	1. Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri 2. Penguatan Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan 3. Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Internasional 4. Pemantapan Peran Indonesia di ASEAN

Sumber: Paparan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan dengan judul Prioritas Nasional Dan Program Prioritas RKP 2019, Disampaikan pada Temu Konsultasi Triwulanan I Bappenas-Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia, Jakarta, 24 Januari 2018

**4.1.3. Penetapan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2019
Provinsi Kalimantan Utara**

Isu strategis yang dihadapi Provinsi Kalimantan Utara selama kurun waktu 5 (lima) tahun mulai 2017 sampai dengan 2023 sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD 2016-2021, masih menjadi isu yang relevan untuk pembangunan Tahun 2019. Isu strategis pembangunan Kalimantan Utara untuk Tahun 2019, meliputi:

1. Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global.
2. Pertumbuhan ekonomi masih bersumber pada kegiatan kegiatan yang rentan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.
3. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan dalam rangka menuju hilirisasi industri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan serta pendukung ketahanan pangan.
4. Rendahnya aksesibilitas, konektivitas antarwilayah dan keterbatasan ketersediaan infrastruktur mengakibatkan ketertinggalan.
5. Kesenjangan wilayah dan ketidakmerataan ruang kegiatan ekonomi berpotensi mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran.
6. Terdapat kegiatan ilegal lintas batas yang mengakibatkan potensi kebocoran ekonomi dan permasalahan sosial.
7. Masih terbatasnya ketersediaan dan distribusi energi.
8. Belum terpenuhinya pengelolaan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintah dalam mendukung pencapaian *good governance* dan *clean governance*.
9. Penurunan daya dukung lingkungan akibat perubahan tata guna lahan untuk pembangunan yang tidak ramah lingkungan.

Kerangka pembangunan nasional jangka menengah yang disajikan di atas tentunya didukung dengan pembangunan daerah. Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan daerah memegang peranan penting. Berkaitan dengan hal tersebut, pada RPJMD

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Provinsi Kalimantan Utara telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Adapun Tahun 2016 sebagai pijakan awal bagi perencanaan RPJMD Tahun 2016-2021. Hal ini dengan pertimbangan bahwa pada saat RPJMD Provinsi Kalimantan Utara disusun pada Tahun 2016, pembangunan Tahun 2016 merupakan masa transisi.

Tahapan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara selama 5 (lima) tahun untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah disusun berdasarkan prioritas. Sasaran yang menjadi fokus untuk dicapai mulai tahun pertama pelaksanaan RPJMD berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar sebagai landasan menuju Kalimantan Utara yang mandiri dan sejahtera. Tahun kedua pelaksanaan RPJMD diharapkan dapat mencapai percepatan pembangunan ekonomi yang telah didukung oleh infrastruktur yang memadai. Tahap selanjutnya dalam implementasi arah kebijakan adalah memacu pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis keunggulan sumber daya manusia, hal ini dapat dilakukan jika percepatan pembangunan ekonomi telah tercapai. Tahun keempat pelaksanaan RPJMD diharapkan telah dapat mencapai pemantapan Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan yang berdaya saing. Pada tahun akhir implementasi RPJMD, diharapkan Provinsi Kalimantan Utara yang mandiri, aman dan damai dapat terwujud seutuhnya. Perwujudan visi, misi dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara secara kronologis dideskripsikan melalui tahapan arah kebijakan Kalimantan Utara sebagai berikut.

Gambar 4.2
Tema/Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2016-2021



Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021

Tema atau fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019: **“Memacu Pembangunan Ekonomi Kalimantan Utara yang Berdaya Saing Berbasis Keunggulan SDM”** dicapai dengan sasaran dan prioritas pembangunan. Sasaran pembangunan Tahun 2019 masih sama dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, sebab RKP Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021.

Prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 diarahkan untuk melaksanakan amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 guna mencapai sasaran pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi. Acuan utama penentuan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 adalah isu strategis, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah RPJMD 2016-2021. Selain itu, penentuan prioritas tersebut juga tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah pusat baik RPJMN 2015-2019 maupun rancangan RKP Tahun 2019.

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Adapun prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin
2. Peningkatan perluasan lapangan kerja
3. Peningkatan kualitas ketrampilan masyarakat
4. Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas
5. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan
6. Peningkatan minat baca di seluruh wilayah perkotaan, pedalaman, pesisir dan perbatasan
7. Pelestarian nilai-nilai budaya
8. Peningkatan mutu pemuda dan pembinaan olahraga
9. Peningkatan promosi dan preventif kesehatan
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan
11. Peningkatan pelayanan keluarga berencana
12. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan
13. Percepatan pembangunan desa secara terpadu
14. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi pertanian
15. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pertanian
16. Peningkatan ketahanan pangan daerah
17. Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap
18. Peningkatan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
19. Mengembangkan potensi pariwisata secara terpadu
20. Pengelolaan pertambangan secara berkelanjutan
21. Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan
22. Peningkatan perdagangan yang mengutamakan pemasaran produk usaha kecil, koperasi dan IKM
23. Pengembangan usaha kecil, koperasi, dan industri kecil dan menengah (IKM)
24. Peningkatan daya tarik berinvestasi

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

25. Pengendalian sistem penataan ruang wilayah yang terintegrasi
26. Penyediaan infrastruktur dasar wilayah
27. Pengembangan sarana dan prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara
28. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan jasa komunikasi dan informatika
29. Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup
30. Peningkatan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan secara terpadu
31. Pengelolaan kebencanaan yang responsive
32. Fasilitasi perwujudan wilayah perbatasan yang tertib dan tenteram
33. Penerapan reformasi birokrasi
34. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur
35. Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu
36. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif
37. Peningkatan sistem pelayanan yang prima
38. Pengembangan regulasi dan kualitas pelayanan perizinan
39. Pembentukan jiwa KORSA yang bersifat abdi masyarakat

Sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 disajikan pada Tabel 4.4. Setiap sasaran dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan Tahun 2019 diambil dari strategi pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021. Hal ini sesuai dengan pengertian strategi yang diamanatkan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah untuk mencapai sasaran. Selanjutnya strategi dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan.

Tabel 4.4
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	
1	Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah	1. Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin	1. Meningkatkan kualitas penanganan dan pembinaan PMKS
			2. Meningkatkan pemberdayaan sosial dan kapasitas hidup bagi PMKS
			3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial
		2. Peningkatan perluasan lapangan kerja	4. Memfasilitasi pencari kerja dan penyedia kerja
		3. Peningkatan kualitas ketrampilan masyarakat	5. Meningkatkan sistem peningkatan ketrampilan dan sarana pelatihan ketenagakerjaan
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	4. Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	6. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan menengah umum dan kejuruan
			7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan luar biasa
			8. Memperkuat pelaksanaan kurikulum, penerapan SPM dan mengembangkan manajemen pendidikan yang bebas gratifikasi
		5. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan	9. Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
		6. Peningkatan minat baca di seluruh wilayah perkotaan, pedalaman, pesisir dan perbatasan	10. Meningkatkan mutu perpustakaan daerah
		7. Pelestarian nilai-nilai budaya	11. Meningkatkan pelestarian dan pemahaman serta apresiasi sejarah, seni dan budaya daerah dalam memperkuat tradisi keragaman
		8. Peningkatan mutu pemuda dan pembinaan olahraga	12. Mengembangkan potensi pemuda pelopor pembangunan

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	
			13. Meningkatkan pembinaan olahraga
3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	9. Peningkatan promosi dan preventif kesehatan	14. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mencegah dan mengatasi masalah kesehatan
		10. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan	15. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan
			16. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
			17. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit
		18. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	
11. Peningkatan pelayanan keluarga berencana	19. Meningkatkan jumlah dan kualitas keluarga ber-KB		
4	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	12. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	20. Meningkatkan pemberdayaan perempuan di berbagai aspek pembangunan
			21. Meningkatkan perlindungan dan hak-hak perempuan dan anak
5	Meningkatnya pembangunan desa	13. Percepatan pembangunan desa secara terpadu	22. Meningkatkan percepatan pembangunan di daerah tertinggal
			23. Mengembangkan wilayah transmigrasi yang produktif
			24. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (<i>green economy</i>)	14. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi pertanian	25. Meningkatkan jaringan irigasi
			26. Meningkatkan ketersediaan sarana produksi pertanian
			27. Mengembangkan teknologi pertanian
		15. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pertanian	28. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM dan kapasitas kelembagaan pertanian
			29. Mengembangkan pemasaran produk pertanian
16. Peningkatan ketahanan pangan daerah	30. Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat		

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	
		17. Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap	31. Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya dan tangkap
			32. Meningkatkan kualitas pelaku usaha perikanan pasca panen (off-farm)
		18. Peningkatan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	33. Meningkatkan potensi dan budaya masyarakat pesisir
			34. Meningkatkan pembinaan dan fasilitas untuk pengawasan pengelolaan kelautan dan perikanan
		19. Mengembangkan potensi pariwisata secara terpadu	35. Meningkatkan kualitas ODTW
			36. Meningkatkan fungsi dan peran SDM dan kelembagaan kepariwisataan
			37. Mengembangkan sistem informasi, pasar dan pariwisata yang terpadu
		20. Pengelolaan pertambangan secara berkelanjutan	38. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pertambangan
		21. Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	39. Mengembangkan hutan kemasyarakatan berbasis hasil hutan non kayu
			40. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari
		22. Peningkatan perdagangan yang mengutamakan pemasaran produk usaha kecil, koperasi dan IKM	41. Mengembangkan komoditi perdagangan yang berdaya saing
			42. Mewujudkan perdagangan lokal yang mendukung pemasaran produk usaha kecil, koperasi dan IKM
			43. Meningkatkan pengawasan peredaran produk layak jual dan memenuhi standar
23. Pengembangan usaha kecil, koperasi, dan industri kecil dan menengah (IKM)	44. Memberdayakan usaha kecil		
	45. Mewujudkan koperasi yang berkualitas		
	46. Memberdayakan industri kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal		
24. Peningkatan daya tarik berinvestasi	47. Mengembangkan sistem perijinan yang cepat dan transparan.		
7	Meningkatnya infrastruktur fisik	25. Pengendalian sistem penataan ruang	48. Mewujudkan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	
	dan ekonomi wilayah	wilayah yang terintegrasi	49. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
			50. Mewujudkan penyelenggaraan, pemanfaatan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau
		26. Penyediaan infrastruktur dasar wilayah	51. Meningkatkan pengelolaan air bersih dan air baku
			52. Menyediakan sistem pengelolaan air minum dan air limbah
			53. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana sarana dasar permukiman
			54. Mewujudkan pengelolaan sampah yang baik dan sehat
			55. Mewujudkan kawasan bebas banjir dan prasarana pengaman abrasi pantai
			56. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyediaan tenaga listrik
57. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana energi			
8	Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga	27. Pengembangan sarana dan prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara	58. Membangun dan mengembangkan sarana prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara
			59. Meningkatkan kemudahan aksesibilitas dan keselamatan bagi pengguna transportasi
		28. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan jasa komunikasi dan informatika	60. Meningkatkan pelayanan jasa dan jaringan komunikasi dan informatika
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	29. Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	61. Meningkatkan efektivitas upaya pemanfaatan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan hidup
			62. Mengendalikan pencemaran air, udara, tanah dan limbah tambang dengan meningkatkan ketaatan perusahaan melalui

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	
			penerapan teknologi ramah lingkungan
10	Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah	30.Peningkatan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan secara terpadu	63. Meningkatkan upaya pencegahan, pengamanan dan penanganan pasca gangguan keamanan wilayah
			64. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air
			65. Membangun sistem dan aturan penegakan hukum yang memadai
			66. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku tertib terhadap hukum dan regulasi
		31.Pengelolaan kebencanaan yang responsive	67. Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana
11	Terwujudnya daerah perbatasan yang tertib dan tenteram	32.Fasilitasi perwujudan wilayah perbatasan yang tertib dan tenteram	68. Meningkatkan cakupan PLB di perbatasan negara
12	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	33.Penerapan reformasi birokrasi	69. Menata kelembagaan perangkat daerah secara optimal berbasis kinerja
			70. Mengembangkan teknologi informasi dan aplikasi telematika dalam rangka e-government
			71. Meningkatkan pelayanan administrasi, umum, kerumahtanggaan dan keprotokolan pemerintah daerah
			72. Mengoptimalkan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah serta pengamanan informasi pemda
		73. Mengoptimalkan fungsi kesekretariatan DPRD	
		34.Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur	74. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan karir ASN
			75. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumberdaya ASN
76. Meningkatkan kapasitas lembaga desa dan aparatur pemerintahan desa			

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	
		35. Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	77. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
			78. Memperkuat jejaring penelitian dan pengembangan pembangunan
			79. Mengembangkan data dan statistik pembangunan yang valid dan terkini
			80. Mengefektifkan pengendalian dan evaluasi pembangunan
			81. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerjasama pembangunan
			82. Meningkatkan penganggaran berbasis kinerja dan program prioritas
			83. Meningkatkan kualitas laporan pelaksanaan pembangunan dan keuangan daerah
			84. Meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa
		36. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	85. Meningkatkan pengawasan perencanaan dan penganggaran pembangunan
			86. Mengembangkan Sistem Pengendalian internal pemerintah SPIP di seluruh SKPD
13	Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas	37. Peningkatan sistem pelayanan yang prima	87. Mengimplementasikan pedoman/SOP pelayanan publik yang prima
			88. Mengembangkan sistem data kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegrasi
		38. Pengembangan regulasi dan kualitas pelayanan perizinan	89. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perizinan
		39. Pembentukan jiwa KORSA yang bersifat abdi masyarakat	90. Mengembangkan integritas, persatuan, patriotisme, kebanggaan, semangat dan daya juang, serta atribut sebagai abdi masyarakat

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2019 yang disajikan diatas, difokuskan lagi menjadi 4 (empat) fokus prioritas dari 39 prioritas pembangunan dalam RPJMD Kalimantan Utara 2016-2021, yaitu:

1. Pengurangan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah dan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan bagi peningkatan kualitas SDM.
2. Pembangunan infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah untuk meningkatkan konektivitas daerah.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam kerangka ekonomi hijau dan mendorong industri kreatif serta pengembangan sumberdaya energi terbarukan.
4. Peningkatan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel meliputi layanan perizinan, kependudukan administrasi pemerintahan dalam wilayah yang aman dan memiliki kepastian hukum didukung oleh aparaturnya yang profesional.

Pemilihan 4 (empat) fokus prioritas ini berdasarkan pada urgensi permasalahan pembangunan daerah dan kebijakan nasional pada tahun 2019. Adapun hubungan antara sasaran, fokus prioritas, arah kebijakan dan program pembangunan daerah tahun 2019, disajikan pada Tabel 4.5. Program prioritas yang ditetapkan untuk melaksanakan fokus prioritas pembangunan merupakan program strategis yang diambil dari program perangkat daerah.

Tabel 4.5

**Sasaran, Fokus Prioritas, Arah Kebijakan dan Program Prioritas
Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019**

NO	SASARAN	FOKUS PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS
1	Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	Pengurangan Jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan bagi Peningkatan Kualitas SDM	Peningkatan kualitas, kuantitas, dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan menengah umum dan kejuruan	1	Pendidikan Menengah Umum
				2	Pendidikan Pendidikan Menengah Kejuruan
2	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan		Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan	3	Pembangunan Sarana dan prasarana serta Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
				4	Pengembangan Permukiman Sehat
				5	Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih
				6	Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin		Peningkatan pemberdayaan sosial dan kapasitas hidup bagi PMKS	7	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
				8	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
4	Percepatan pembangunan desa secara terpadu		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	9	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
				10	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
5	Pengembangan sarana dan prasarana fisik	Pembangunan Infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah	Pembangunan dan Pengembangan sarana prasarana fisik utama	1	Pembangunan Jalan dan Jembatan
				2	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

NO	SASARAN	FOKUS PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS
	utama transportasi darat, laut dan udara	untuk meningkatkan konektivitas daerah	transportasi darat, laut dan ASDP	3	Pengembangan Perhubungan Darat
6	Penyediaan infrastruktur dasar wilayah			4	Pengembangan Perhubungan Laut dan ASDP
7	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan jasa komunikasi dan informatika			5	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
8	Pengendalian sistem penataan ruang wilayah yang terintegrasi			6	Pengendalian Pemanfaatan Ruang
9	Peningkatan ketahanan pangan daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam kerangka ekonomi hijau dan mendorong industri kreatif serta pengembangan sumberdaya energi terbarukan	Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat	1	Peningkatan Ketahanan Pangan
10	Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap			2	Pengembangan Perikanan Tangkap
				3	Pengelolaan Perikanan Budidaya
11	Peningkatan daya tarik berinvestasi			4	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
12	Pengelolaan pertambangan secara berkelanjutan			5	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
				6	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
13	Pengembangan usaha kecil, koperasi, dan industri kecil dan menengah (IKM)			7	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

NO	SASARAN	FOKUS PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS	
14	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan		Peningkatan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari	8	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (<i>Social Forestry</i>)	
15	Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik yang transparan dan akuntabel meliputi Layanan Perizinan, Kependudukan Administrasi Pemerintahan dalam wilayah yang aman dan memiliki kepastian hukum didukung oleh aparatur yang profesional	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumberdaya ASN	1	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	
				2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
16	Peningkatan sistem pelayanan yang prima		Pengimplementasian pedoman/SOP pelayanan publik yang prima	3	Peningkatan Pelayanan Perizinan	
17	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif			Pengembangan Sistem Pengendalian internal pemerintah SPIP di seluruh SKPD	4	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian internal Pemerintah (SPIP)
					5	Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
18	Penerapan reformasi birokrasi		Pengembangan teknologi informasi dan aplikasi telematika dalam rangka e-government	6	Penataan Administrasi Kependudukan	
				7	Peningkatan layanan Informasi Publik	

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 selain diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara, juga untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2019. Hal ini bertujuan supaya terwujud sinergi pembangunan antara pusat dan daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Berikut ini disajikan keterkaitan dari fokus prioritas dan prioritas pembangunan Kalimantan Utara dengan prioritas nasional Tahun 2019.

Tabel 4.6
Prioritas Pembangunan Kalimantan Utara Tahun 2019
yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2019

No	Prioritas Nasional	Provinsi Kalimantan Utara	
		Fokus Prioritas	Prioritas Pembangunan
1	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.	Pengurangan Jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan bagi Peningkatan Kualitas SDM	1. Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin
			2. Peningkatan perluasan lapangan kerja
			3. Peningkatan kualitas ketrampilan masyarakat
			4. Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas
			5. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan
			6. Peningkatan minat baca di seluruh wilayah perkotaan, pedalaman, pesisir dan perbatasan
			7. Pelestarian nilai-nilai budaya
			8. Peningkatan mutu pemuda dan pembinaan olahraga
			9. Peningkatan promosi dan preventif kesehatan
			10. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan
			11. Peningkatan pelayanan keluarga berencana
			12. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan
			2

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Nasional	Provinsi Kalimantan Utara	
		Fokus Prioritas	Prioritas Pembangunan
	melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.	untuk meningkatkan konektivitas daerah	<p>14. Pengendalian sistem penataan ruang wilayah yang terintegrasi</p> <p>15. Peningkatan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan</p>
3	Memantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air		<p>16. Penyediaan infrastruktur dasar wilayah</p> <p>17. Pengembangan sarana dan prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara</p> <p>18. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan jasa komunikasi dan informatika</p> <p>19. Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup</p> <p>20. Peningkatan ketahanan pangan daerah</p>
4	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam kerangka ekonomi hijau dan mendorong industri kreatif serta pengembangan sumberdaya energi terbarukan	<p>21. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi pertanian</p> <p>22. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pertanian</p> <p>23. Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap</p> <p>24. Mengembangkan potensi pariwisata secara terpadu</p> <p>25. Pengelolaan pertambangan secara berkelanjutan</p> <p>26. Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan</p> <p>27. Peningkatan perdagangan yang mengutamakan pemasaran produk usaha kecil, koperasi dan IKM</p> <p>28. Pengembangan usaha kecil, koperasi, dan industri kecil dan menengah (IKM)</p> <p>29. Peningkatan daya tarik berinvestasi</p> <p>30. Peningkatan sistem pelayanan yang prima</p> <p>31. Pengembangan regulasi dan kualitas pelayanan perizinan</p>

Bab IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Nasional	Provinsi Kalimantan Utara	
		Fokus Prioritas	Prioritas Pembangunan
5	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.	Peningkatan Pelayanan Publik yang transparan dan akuntabel meliputi Layanan Perizinan, Kependudukan Administrasi Pemerintahan dalam wilayah yang aman dan memiliki kepastian hukum didukung oleh aparatur yang profesional	32. Peningkatan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan secara terpadu
			33. Pengelolaan kebencanaan yang responsif
			34. Fasilitasi perwujudan wilayah perbatasan yang tertib dan tenteram
			35. Penerapan reformasi birokrasi
			36. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur
			37. Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu
			38. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif
			39. Pembentukan jiwa KORSA yang bersifat abdi masyarakat